

BNPB Tegaskan Tak Ada Asap Karhutla Melintas ke Negara Tetangga Indonesia

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan, tidak ada kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang melintas ke negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, bahkan Australia.

"Jadi beberapa waktu yang lalu ada ya isu, informasinya ada asap yang sudah menyeberang ke wilayah negara tetangga, Singapura, Malaysia, dan Australia ternyata tidak terbukti," tegas Suharyanto pada Puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Jumat (13/10).

Suharyanto pun mengatakan saat ini ada provinsi-provinsi prioritas yang sedang mengalami karhutla.

"Di Sumatera ada 3 Provinsi, ada Sumatera Selatan, Jambi, Riau. Kemudian di Kalimantan, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan

Selatan." Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan bahwa Indonesia mengalami anomali, di satu wilayah mengalami kekeringan dan fenomena El Nino.

Namun, di wilayah Indonesia lainnya telah mengalami bencana hidrometeorologi.

"Nah memang Indonesianya anomali, tadi saya katakan ada bencana kekeringan dan El Nino tetapi di tempat-tempat lain sudah hidrometeorologi basah, itu sudah banjir di Aceh. Sumatera Utara sudah banjir," kata Suharyanto.

"Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan, tetapi di atasnya lagi kalau mantan utara sudah banjir. Itulah memang menjadi PR kita bersama bahwa karakteristik Indonesia bencananya banyak, semua bencana yang ada di dunia itu ada di Indonesia," katanya. ● mei

KPK Cecar Bupati Lamongan soal Proyek Pembangunan Kantor Pemkab

JAKARTA (IM) - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019 pada Kamis (12/10).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Yuhronur saat itu merupakan menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Lamongan.

"Saksi hadir dan didalam pengetahuannya antara lain terkait dengan usulan awal dari proyek pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan TA 2017 s/d 2019 dimana saat itu saksi masih menjabat selaku Sekda Pemkab Lamongan," ungkap Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (13/10).

Yuhronur juga mengatakan hal senada soal setelah menjalani pemeriksaan. Ia mengakui

didalami soal Pembangunan Gedung Pemda pada tahun anggaran 2017-2019.

"Iya sebagai saksi untuk yang keterangan lebih lengkap," ungkapnya.

Kendati demikian ia belum membeberkan siapa pihak-pihak yang menjadi tersangka atas kasus ini. Ia pun mengaku tidak mendapatkan aliran dana apapun.

"Enggak ada (aliran dana)," ujarnya.

Sekadar informasi, KPK kembali mengusut kasus baru. Kali ini, KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur.

Kasus baru tersebut terungkap setelah adanya pengeledahan di beberapa lokasi daerah Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari belakangan. Pengeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam kasus baru yang sedang disidik KPK ini. ● han

KPU Teken MoU dengan PBNU untuk Sukseskan Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Hal ini sebagai tanda kesepakatan KPU RI dengan PB NU untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengatakan, kerjasama itu berbentuk berbagai macam kegiatan. Di antaranya, kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilu lewat program yang sedang diselenggarakan NU.

Salah satu program NU yakni Keluarga Masalah NU yang melibatkan keluarga NU tingkat desa.

"Mungkin nanti KPU bisa masukkan konten pendidikan pemilih di dalam program-program atau kegiatan-kegiatan gerakan keluarga masalah NU," ucapnya di kantor PBNU, Jakarta Pusat,

Jumat (13/10). Yahya Cholil Staquf mengatakan, nantinya KPU bisa mengkaitkan program NU untuk sosialisasi Pemilu. Tentunya, dengan mekanisme KPU itu sendiri.

"Saya percaya punya sejumlah rencana terkait dengan itu karena dulu waktu saya jadi anggota KPU juga gitu dan ini akan kita bantu ya KPU ini, kan enggak mungkin PBNU ngarang program sendiri," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KPU juga menyatakan akan memfasilitasi para pemilih di Pondok Pesantren untuk Pemilu 2024. Fasilitas tersebut yakni dengan Pemungutan suara yang akan dilakukan di pesantren-pesantren.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan hal ini agar masyarakat do pesantren bisa menggunakan haknya. Terutama masyarakat pesantren yang tidak bisa pulang ke kampung halaman. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PENANDATANGANAN KERJA SAMA KPU DAN PBNU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kanan) saat penandatanganan kerja sama (MoU) penyelenggaraan Pemilu 2024 di gedung PBNU, Jakarta, Jumat (13/10). Penandatanganan MoU kerja sama tersebut dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jokowi Bicara Soal Politik Dinasti Dikaitkan Nama Gibran Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Isu dinasti politik Jokowi kian santer jelang pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2024. Nama Gibran disebut kandidat cawapres Prabowo.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal anggapan munculnya dinasti politik yang dikaitkan dengan masuknya nama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Jokowi menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sendiri terkait isu tersebut. "Serahkan masyarakat saja," ujar Jokowi saat berada di Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi pada Jumat (13/10).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menjawab pertanyaan soal apakah Gibran sudah berkonsultasi kepadanya soal menjadi bakal cawapres bagi Prabowo Subianto.

Jokowi menjelaskan bahwa dirinya sudah beberapa bulan tak bertemu dengan Wali Kota Solo itu.

"Beberapa bulan enggak pernah ketemu," tuturnya.

Isu dinasti politik Jokowi semakin mengemuka

mendekati masa pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Nama Gibran Rakabuming Raka pun disebut-sebut sebagai salah satu kandidat cawapres untuk bakal capres Prabowo Subianto. Namun, Gibran terkendala syarat batas usia cawapres karena saat ini belum memenuhi batas usia minimal 40 tahun.

Sementara itu, syarat batas usia capres dan cawapres yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Pemilu saat ini sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi, mengingatkan MK bahwa gugatan tersebut mengandung muatan politik yang sangat kuat. Hendardi menyebutkan 3 perkara di antaranya, yang tinggal menanti putusan Mahkamah itu saat ini memasuki episode kritis dan membahayakan.

"Deretan permohonan uji materiil ini bukan lagi ditujukan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga tetapi diduga kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi

dan para pemuja Jokowi yang hendak mengusung Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, yang belum genap 40 tahun, sebagai calon wakil presiden (pemanding) Prabowo," ujar Hendardi ketika dikonfirmasi, Selasa (10/10).

Tiga perkara itu meliputi perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi, yang meminta batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun. Kedua yaitu pada perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Garuda.

Dalam gugatannya, pengalaman sebagai penyelenggara negara diminta dapat menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun.

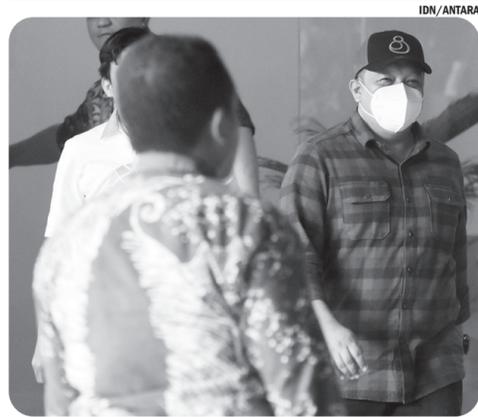
Sementara itu, pada perkara nomor 55/PUU-XXI/2023, duo kader Gerindra, yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, mengajukan petition yang sama dengan Partai Garuda.

Hendardi mengingatkan, sudah banyak pakar hukum yang menegaskan bahwa perkara batas usia untuk menduduki jabatan publik tertentu bukan isu konstitusional, melainkan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tidak seharusnya diputus

oleh MK.

Beberapa putusan terdahulu juga telah menegaskan posisi Mahkamah bahwa MK tak berwenang mengadili hal tersebut. Sidang pemeriksaan tiga perkara tadi juga sudah kelar pada 29 Agustus 2023. Namun MK baru akan membacakan putusannya pada Senin (16/10)pekan depan.

"Operasi politik pengu-sung dinasti Jokowi, hampir mengoyahkan MK untuk memenuhi hasrat kandidasi anak presiden. Semua elemen harus mengingatkan dan mengawal MK, agar tidak menjadi instrumen legalisasi kandidasi yang menopang dinasti Jokowi," jelas Hendardi. ● han



KPK KEMBALI PERIKSA DIREKTUR ALAT DAN MESIN PERTANIAN KEMENTAN

Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/10). Muhammad Hatta kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan).

KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Kemlu Fasilitasi Kepulangan 35 Wisatawan Religi ke Tanah Air

JAKARTA (IM) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memfasilitasi proses kepulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan wisata religi dari Konflik Israel-Palestina ke Tanah Air.

Dia melaporkan Kemlu RI telah memfasilitasi kepulangan 231 wisatawan religi dari wilayah konflik dan ma-

suk ke Yordania. Kemudian dari Yordania dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2023 lalu.

"Pada awal ada 231 melakukan wisata religi sudah dapat keluar dan masuk ke wilayah Yordania pada tanggal 9 Oktober dan selanjutnya sudah tiba di Indonesia dengan selamat," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan

Hukum Indonesia (PwNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Kemudian ada juga 38 WNI yang telah keluar dari wilayah Yordania pada tanggal 11 Oktober 2023 dan sudah kembali ke Indonesia. Lalu pada hari berikutnya tanggal 12 Oktober 2023,

ada 44 WNI telah kembali ke Indonesia.

"Saat ini masih ada 35 WNI kita yang melakukan wisata religi yang saat ini masih ada dan kita akan fasilitasi tanggal 14 Oktober. Kita akan bantu untuk proses keluarnya bekerja sama dengan travel agent yang ada," ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa ratusan wisatawan religi yang telah pulang ke Indonesia dengan status kepulangan mandiri. "WNI Wisata religi sudah kembali ke Indonesia, karena sudah diatur tiket kepulangan oleh travel jadi statusnya mandiri," kata dia.

Sama halnya dengan 35 WNI yang akan dipulangkan besok ke Tanah Air. Kemlu, lanjutnya hanya memfasilitasi proses kepulangan yakni memastikan agar mereka diperbolehkan crossing border dari wilayah Israel ke Yordania. Kemudian wisatawan religi direschedule tiketnya dengan berbicara melalui maskapai penerbangan masing-masing.

"Masih ada 35, sejak awal rencana mereka sudah menyiapkan tiket pulangnya tinggal disesuaikan. Tugas Kemlu utamanya WNI aman kita memfasilitasi proses kepulangannya," tandasnya.

Evakuasi 4 WNI

Selain itu, kata Judha, pihaknya juga berhasil mengevakuasi 4 warga negara Indonesia (WNI) dari beberapa titik di Israel ke

Jordania. Evakuasi ini berhasil dilakukan melalui koordinasi intensif Kemlu RI dan KBRI Amman. "Empat WNI tersebut saat ini telah aman dan selamat berada di wilayah Jordania setelah melakukan perjalanan darat sekitar 2 jam melalui perbatasan Jordan River Crossing/Sheikh Hussein," kata Judha.

Kemlu RI masih terus mengupayakan evakuasi terhadap 10 WNI yang masih berada di Gaza, Palestina.

"Kemlu dan bersama Perwakilan RI masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI di Gaza," katanya.

Sebelumnya, keempat WNI tersebut berada di Tel Aviv dan dievakuasi menuju Yordania. Setelah melalui evakuasi darat sekitar 2 jam, mereka telah berada di perbatasan Jordan River Border Crossing/Sheikh Hussein. ● han



KEPESERTAAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN PEKERJA RENTAN
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan sambutan saat peluncuran kepesertaan jaminan ketenagakerjaan pekerja rentan di Kelurahan Bangsal, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (13/10). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat mendaftarkan sebanyak 9.300 pekerja rentan yakni pekerja informal, berisiko tinggi, dan berpenghasilan rendah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

mandiri

PEMBERITAHAUAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kepada Yth.
CV. Mitra Abadi
Sunter Garden Blok D.6 No. 12
Jakarta Utara

Up. - Sdr. Tiung Fran Sasmita (Direktur)
- Sdr. Suwandji Aje (Komisaris)

Menunjuk Perjanjian Pengalihan Piutang Bank (Cessie) telah dilakukan dengan Akta Notaris Ade Suryatini, SH., M.Kn. No. 24 tanggal 26 September 2023 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai catatan administrasi kami, jumlah kewajiban kredit Saudara per 25 Agustus 2023 adalah sebesar Rp. 370.333.833,00 (terbilang tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Sebagai upaya penyelesaian fasilitas kredit Saudara maka pada tanggal 26 September 2023, kami telah melaksanakan pengalihan piutang (Cessie) atas fasilitas kredit Saudara berikut dokumen yang berhubungan dengan fasilitas kredit Saudara kepada kreditur baru sbb:
 - Nama : Rizki Fiszawati Dewi
 - Alamat : Tukul Gong Ji. D GG Timbul RT.010 RW.006, Kel. Pejajalan, Penjaringan Jakarta Utara

Dengan telah beralihnya piutang tersebut maka setiap dan/atau seluruh piutang atau tagihan kredit Saudara menjadi hak dan milik dari kreditur baru tersebut.

Jakarta, 14 Oktober 2023
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail
Collection & Recovery Region V

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILIHAN

PT TAMAN WISATA MATAHARI berkedudukan di Kabupaten Bogor (Perseroan)
Perseroan dengan ini mengumumkan rencana pengambilhian saham Perseroan oleh PT TAMAN SAFARI INDONESIA dari pemegang saham Perseroan yaitu Ny. Anna Yanti dan Tn. Hananto Khoeh, yang akan mengakibatkan beralhnya pengendalian atas Perseroan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor yang keberatan atas Pengambilhian tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai alasannya kepada Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini yang ditujukan kepada:
PT Taman Wisata Matahari
Beralamat di Jl. Raya Puncak Km. 77, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, 16750, Jawa Barat - Indonesia
U.p. : Direksi
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (2) dan (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Bogor, 14 Oktober 2023
PT Taman Wisata Matahari PT Taman Safari Indonesia